

PENYAJIAN INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KOTA JAYAPURA

Dian Pertiwi¹, Muhammad Ridhwansyah Pasolo², Abdul Rasyid³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua
diandppertiwi@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua
mrpasolo@gmail.com

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua
abdulrasyidfeuniyap@gmail.com

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dan memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian di beberapa negara dan wilayah Indonesia, termasuk Kota Jayapura Provinsi Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penyajian informasi akuntansi UMKM dan alasannya dikaitkan dengan *Theory of Reasoned Action* (TRA). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi nonperilaku analisis catatan. Sebanyak 30 pelaku UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini yang dipilih secara random.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang menyajikan informasi akuntansi lebih sedikit dibandingkan yang tidak menyajikan. Penyajian informasi akuntansi cenderung ditujukan untuk kepentingan internal yang bentuk pencatatannya masih sederhana. Kurangnya pengetahuan akuntansi dan merasa tidak butuh informasi akuntansi menjadi alasannya. Kurangnya desakan dari pihak eksternal juga menjadi faktor UMKM tidak menyajikan informasi akuntansi. Penelitian ini merekomendasikan ke pemerintah, lembaga keuangan pemberi modal, dan dewan standar untuk lebih memberikan alternatif pencatatan yang sesuai dengan skala usaha masing-masing dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Kata Kunci: UMKM, informasi akuntansi, pencatatan akuntansi

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan ekonomi khususnya di negara berkembang [1]. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga mengakibatkan perusahaan – perusahaan besar mengalami kebangkrutan. Saat itu, UMKM menjadi penopang kegiatan ekonomi nasional. Sebagai salah satu penopang perekonomian nasional, UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia, penyerapan 97% tenaga kerja, dan menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sekitar 60% (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 2017). Besarnya kontribusi tersebut mengantarkan UMKM mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia (Bank Indonesia, 2015).

UMKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang tumbuh subur di Papua. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua tahun 2018, realisasi persentase UMKM mencapai 15% dari nilai yang

ditargetkan hanya 4%. Pada tahun 2014, penyerapan tenaga kerja mencapai 68%. Namun, kontribusi pelaku UMKM terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2017 hanya mencapai 2% (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018).

Besarnya kontribusi UMKM tidak berarti bisnis UMKM berjalan dengan mulus. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyatakan total pelaku UMKM yang ada di Indonesia mencapai 59,2 juta. Jumlah usaha kecil di Indonesia mencapai 93,4%, kemudian usaha menengah 5,1%, dan yang besar hanya 1% saja. Untuk Provinsi Papua sendiri, jumlah UMKM sampai dengan tahun 2018 mencapai 153,3 ribu. Dari total UMKM tersebut 87% adalah usaha mikro, 12% adalah usaha menengah, dan 1% adalah usaha menengah. Pada prinsipnya angka tersebut tidak menunjukkan adanya perubahan setiap tahunnya. Dari data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua tahun 2018 juga menunjukkan bahwa persentase UMKM yang berkualitas hanya mencapai 7,78% dari nilai yang ditargetkan sebesar 10,23%. Hal ini menunjukkan adanya

hambatan dan kendala yang harus dihadapi para pelaku UMKM, baik yang bersifat internal maupun eksternal (Bank Indonesia, 2015). Hambatan secara eksternal tercermin dari adanya perlambatan pertumbuhan penyaluran kredit ke UMKM. Pada triwulan 1 tahun 2019, terjadi perlambatan sekitar 0,5% pertumbuhan penyaluran kredit dari triwulan sebelumnya di Provinsi Papua (Bank Indonesia, 2019).

Bagi pemerintah, pengembangan UMKM sangat penting. Dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan usaha besar lainnya dapat menyediakan pembiayaan bagi UMKM dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Dalam memberikan pinjaman kepada UMKM tentunya diperlukan informasi terkait aktivitas keuangan UMKM.

Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa kewajiban pelaku UMKM yang telah memperoleh izin usaha salah satunya adalah menyusun pembukuan kegiatan usaha. Pembukuan kegiatan usaha yang dimaksud berupa laporan keuangan yang memisahkan antara harta usaha dan harta bukan usaha pelaku UMKM. Dengan demikian, informasi akuntansi akan tersedia pada pembukuan kegiatan usaha tersebut.

Informasi akuntansi sangat penting dalam membantu entitas pada sangat menghadapi masalah jangka pendek seperti pembiayaan, pengeluaran dan arus kas [3]. Informasi akuntansi merupakan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan rasio – rasio keuangan [4]. Kajian akademik yang dilakukan oleh Lembaga Pemingkat Kredit UMKM Indonesia menunjukkan bahwa pengembangan UMKM di Indonesia terkendala di sisi permintaan, yaitu karakteristik UMKM yang unik dan tidak adanya informasi keuangan yang transparan dan terorganisir [5].

Fakta di atas menunjukkan bahwa informasi akuntansi merupakan salah satu alat yang dapat membantu UMKM untuk berkembang. Munjeyi, dkk (2017) menyatakan bahwa banyak UMKM yang tidak berkembang bahkan bangkrut karena informasi akuntansi yang buruk. Sistem akuntansi yang baik akan

memberikan informasi kepada pelaku UMKM untuk mengukur aktivitas bisnis UMKM melalui pengukuran kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa, selain untuk memperoleh pembiayaan dari pihak eksternal, informasi juga berguna bagi pihak internal dalam mengambil keputusan ekonomi terkait aktivitas operasi UMKM. Namun, UMKM masih kurang menyadari pentingnya melakukan pencatatan sehingga berdampak pada penyajian informasi akuntansi yang minim ([6] dan [1]).

Penelitian yang fokus pada UMKM telah dilakukan di beberapa negara dan wilayah Indonesia. Penelitian akan dilakukan di Kota Jayapura Provinsi Papua. Sebagaimana, UMKM adalah salah satu kegiatan ekonomi yang tumbuh subur di wilayah Papua namun target realisasi persentase UMKM yang berkualitas belum terpenuhi. Penelitian ini akan menginvestigasi jenis pencatatan akuntansi yang dibuat oleh pelaku UMKM. Selanjutnya penelitian ini juga menginvestigasi alasan UMKM membuat atau tidak membuat pencatatan akuntansi yang dikaitkan dengan *Theory of Reasoned Action*. Manfaat mengenai informasi akuntansi berdasarkan pengalaman masing-masing pelaku UMKM akan disajikan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi UMKM Secara Umum

Definisi UMKM secara umum dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu definisi kualitatif dan definisi kuantitatif. Definisi kualitatif membantu masyarakat dalam memahami sifat UMKM serta peran pemilik dan pihak yang berkepentingan dalam menjalankan bisnis. Sementara definisi kuantitatif lebih menekankan pada pengukuran jumlah karyawan, total aset, dan perputaran penjualan [7].

2.2. Definisi Kualitatif

Bolton Committee (1971:1) dalam Drever, Stanton, Mc. Gowan mendefinisikan UMKM secara karakteristik kualitatif sebagai berikut: a). Perusahaan kecil secara relatif memiliki pangsa pasar yang kecil b). UMKM dikelola oleh pemiliknya dengan caranya sendiri dan tidak memiliki struktur organisasi yang formal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pemisahan tugas di UMKM dan c). UMKM independen, artinya bukan bagian dari perusahaan besar dan tidak dikontrol oleh pihak luar dalam mengambil keputusan [7].

2.3. Definisi Kuantitatif

Definisi UMKM secara kuantitatif dibagi ke dalam dua karakteristik yaitu a). ukuran, terkait pendapatan/penjualan, jumlah karyawan, dan jumlah aset dan b). struktur secara hukum: perseorangan, persekutuan, atau perseroan terbatas.

2.4. Definisi UMKM Menurut Undang – Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, menjelaskan definisi dan kriteria UMKM bahwa a). Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 b). Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 c). Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 [2].

2.5. Definisi UMKM Menurut SAK EMKM

Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam

Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya-tidaknya selama dua tahun berturut-turut.

2.5. Informasi Akuntansi

Informasi akuntansi merupakan inti dari informasi perusahaan. Informasi akuntansi UMKM merupakan suatu proses yang berkelanjutan, tujuannya adalah untuk mendukung manajemen dalam mengambil keputusan yang akurat. Dengan demikian UMKM dapat bertahan dan berkompetisi dengan lingkungan ekonomi dan bisnis yang terus berkembang [8].

Informasi akuntansi berupa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) tahun 2018, laporan keuangan lengkap entitas terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan [4].

Sesuai dengan SAK EMKM tahun 2018, laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan [10]. Laporan posisi keuangan tersebut dapat mencakup akun-akun: kas dan setara kas; piutang; persediaan; aset tetap; utang usaha; utang bank; dan ekuitas. Selanjutnya laporan laba rugi entitas menyajikan informasi terkait kinerja keuangan entitas untuk satu periode. Informasi yang disajikan dapat mencakup akun-akun: pendapatan; beban keuangan; dan beban pajak. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan entitas memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi. Selain itu, dalam catatan atas laporan keuangan entitas juga memuat ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam entitas. Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material juga disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Tujuannya adalah memudahkan pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas [10].

2.6. Praktik Penyajian Informasi Akuntansi UMKM

Penelitian AL Smirat di Jordan menunjukkan bahwa 43% UMKM yang menjadi sampel tidak menyiapkan pelaporan keuangan. Kemudian, jika UMKM menyiapkan laporan keuangan, unsur laporan keuangan yang paling banyak disajikan adalah laporan laba rugi, lalu laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan terakhir adalah laporan arus kas. Dari semua UMKM yang menyiapkan pelaporan keuangan, 73% menggunakan dasar kas dalam melakukan pencatatan transaksi. Hal lain yang dihasilkan dari studi AL Smirat adalah terdapat perbedaan pencatatan yang menjadi prioritas utama UMKM di Jordan. Di sektor retail, UMKM lebih berfokus pada pencatatan penjualan harian. Sedangkan di sektor manufaktur lebih fokus pada penyajian daftar aset [4]. Penelitian AL Smirat ini sejalan dengan penelitian Son, N. Marriot dan P. Marriot tahun 2006 dan penelitian Amoako tahun 2013.

Penelitian pada UMKM di Vietnam, menemukan bahwa informasi akuntansi berupa arus kas dan *forecast* tidak disajikan, atau apabila informasi ini disajikan, UMKM menyajikannya dengan penyajian yang buruk [3]. Seperti halnya UMKM di Vietnam, UMKM di Ghana juga tidak menyiapkan laporan keuangan yang layak, kebanyakan UMKM melakukan pencatatan dalam bentuk tidak formal [1].

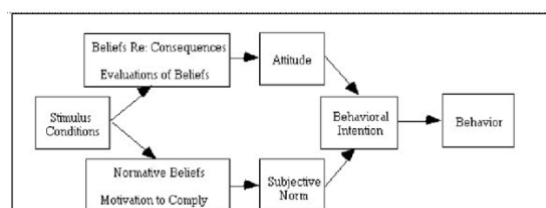
Di Indonesia, tepatnya di Depok Jawa Barat, kebanyakan UMKM telah melakukan pencatatan akuntansi [11]. Sebagian besar UMKM telah melakukan pencatatan akuntansi namun belum melakukan pembukuan. Pencatatan akuntansi tersebut terkait pencatatan utang piutang, laporan penerimaan, dan pengeluaran.

Studi AUFAR, menunjukkan bahwa UMKM di Bandung telah melakukan pencatatan atau pembukuan akuntansi atas semua transaksi yang terjadi [12]. Pencatatan tersebut berkaitan dengan kas masuk, kas keluar, utang, piutang, inventaris kekayaan, persediaan barang, transaksi penjualan dan pembelian. Penelitian mengenai UMKM juga dilakukan oleh Indralaksana di Kecamatan Nusa Penida Bali. Hasil penelitian menemukan bahwa sistem informasi akuntansi pada UMKM di Nusa

Penida berada pada kategori baik [13]. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM pada daerah tersebut sudah melakukan pencatatan akuntansi dengan layak. Pencatatan akuntansi menghasilkan informasi akuntansi sehingga dapat dikatakan bahwa UMKM di Kecamatan Nusa Penida Bali melakukan penyajian informasi akuntansi.

2.7. Theory of Reasoned Action (TRA)

Theory of Reasoned Action (TRA) dikembangkan oleh Icek Ajzen dan Martien Fishbein.



Sumber: Icek Ajzen dan Martien Fishbein (1980)

Gambar 1.
Theory of Reasoned Action (TRA)

Banyak perilaku-perilaku yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari dibawah kontrol kemauan pelaku (*volitional control*). Perilaku volitional adalah perilaku-perilaku yang individual menginginkannya, atau menolak untuk tidak melakukannya. Perilaku lainnya yang dilakukan oleh manusia adalah perilaku yang diwajibkan (*mandatory behavior*). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku dilakukan karena individual mempunyai niat atau keinginan untuk melakukannya [14].

Tuntutan atau kewajiban dari pekerjaan akan membuat individu melakukan sesuatu bukan atas kemauannya, dan hal ini dapat ditimbulkan oleh fungsi yang berhubungan dengan factor pribadi atau pengaruh sosial.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi nonperilaku analisis catatan. Wawancara ditujukan kepada pelaku UMKM di Kota Jayapura dan staf yang mewakili Pemerintah Daerah di Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura. Observasi nonperilaku analisis catatan menggunakan pencatatan akuntansi dari pelaku UMKM. Pemilihan sampel UMKM yang akan di wawancara dilakukan secara random yang

3.

melingkupi seluruh distrik yang ada di Kota Jayapura. UMKM yang dipilih menjadi sampel adalah UMKM yang tidak termasuk dalam binaan Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura dan telah menjalankan usaha lebih dari 2 tahun. Sebanyak 30 pelaku UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini.

Dari data yang telah dikumpulkan, data dianalisis dengan teknik yang mengacu pada analisis data kualitatif [15]. Analisis data kualitatif terdiri dari aktivitas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengolahan data menunjukkan 57% dari total sampel pelaku UMKM adalah usaha berskala mikro, 40% berskala kecil, dan 3% berskala menengah. Pelaku UMKM masih didominasi oleh usaha berskala mikro. Sesuai dengan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua bahwa persentase terbesar untuk skala usaha UMKM adalah usaha mikro yaitu sebesar 87%.

Jenis usaha yang dijalankan oleh sampel UMKM adalah 60% kios, 20% makanan/minuman jadi, sisanya 10% merupakan usaha lainnya terdiri dari usaha hasil pertanian/perkebunan/laut/bumi dan manufaktur. Sebesar 74% latar belakang pendidikan pemilik usaha dan karyawan didominasi oleh lulusan SMA, 13% sedang berkuliah, 10% sarjana, dan 3% lulusan SMP. Berdasarkan masing-masing skala usaha, 71% dari total sampel UMKM dengan skala mikro tidak membuat pencatatan dan sebesar 29% telah membuat pencatatan terkait aktivitas bisnisnya. Kemudian, 42% dari total sampel UMKM dengan skala kecil tidak membuat pencatatan dan 58% telah membuat pencatatan. Untuk UMKM berskala menengah telah membuat pencatatan akuntansi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa skala usaha mempengaruhi kebutuhan pencatatan akuntansi yang dibuat oleh UMKM (Holmes dan Nicholls, 1988; Yasa, Herawati, dan Sulindawati, 2017; Utami, 2018). Apabila skala usaha meningkat, proporsi penyediaan informasi akuntansi juga meningkat [16].

4.1. Penyajian Informasi Akuntansi Oleh UMKM

Informasi akuntansi berupa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan tersebut akan

merepresentasikan aktivitas bisnis dari UMKM. Hal ini karena sistem akuntansi mengakomodir semua aktivitas bisnis melalui penjurnalan yang kemudian diklasifikasi dalam buku besar dan diikhtisarkan dalam laporan keuangan. Informasi akuntansi yang penting untuk disajikan oleh pelaku UMKM adalah informasi mengenai arus kas, aset tak berwujud, dan rasio keuangan yang mengukur pertumbuhan bisnis UMKM [6].

Hasil pengolahan data menunjukkan 57% dari total sampel pelaku UMKM di Kota Jayapura tidak membuat pencatatan dan 43% dari total sampel pelaku UMKM tersebut telah membuat pencatatan akuntansi. Pencatatan yang telah dibuat belum sesuai dengan laporan keuangan Standar Akuntansi. Namun, pencatatan tersebut merupakan salah satu bagian dari siklus akuntansi. Pencatatan ini mengindikasikan adanya penyajian informasi akuntansi pada UMKM.

Pelaku UMKM berskala mikro dan kecil masih membuat pencatatan yang sifatnya informal yaitu mencatat jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran. Bentuk pencatatan seperti buku besar kas. Terdiri dari tiga kolom yaitu pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Sebanyak 93% dari total sampel berskala mikro dan kecil mencatat pemasukan dan pengeluaran secara manual pada buku dan sisanya 7% melakukan pencatatan berbasis komputer. Pemasukan dan pengeluaran dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau yang dikeluarkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan tersebut menggunakan basis kas. Pencatatan yang dibuat adalah pencatatan aktivitas usaha harian atau mingguan.

Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Son, N. Marriot, dan P. Marriot, Ediraras, Aufar. Ketiga penelitian tersebut menemukan bahwa pencatatan akuntansi yang dibuat oleh UMKM adalah pencatatan kas masuk dan kas keluar atau mencatat penerimaan dan pengeluaran ataupun membuat arus kas untuk aktivitas operasional. Hasil penelitian Al Smirat juga menunjukkan bahwa 73% UMKM menggunakan basis kas sebagai dasar pencatatan akuntansi yang dibuat. Pembukuan yang dibuat oleh UMKM masih manual (*paper based*) [17].

Untuk UMKM berskala menengah telah membuat pencatatan secara formal dan lengkap. Pencatatan berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan

laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Pemilik usaha menggunakan jasa akuntan untuk membuat pencatatan tersebut. Namun demikian, pencatatan lengkap tersebut digunakan untuk kepentingan pihak eksternal. Untuk kepentingan internal, pelaku UMKM masih mencatat jumlah pemasukan dan pengeluaran berdasarkan faktur ataupun nota tiap harinya. Laporan keuangan yang dibuat oleh jasa akuntan tidak dijadikan dasar evaluasi kinerja untuk pihak internal usaha karena pemilik dan karyawan tidak memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai. Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Holmes dan Nicholls tahun 1988 yang menyatakan bahwa penyajian informasi akuntansi yang sifatnya *statutory*, *budgeting*, dan informasi tambahan telah dilakukan oleh pelaku usaha berskala menengah [16].

Pencatatan yang dilakukan oleh pelaku UMKM pada tiga kategori skala usaha sudah menerapkan prinsip entitas ekonomi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Alasan dilakukannya pemisahan keuangan tersebut agar pelaku UMKM benar-benar dapat mengetahui jumlah keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah memiliki pengetahuan mengenai pentingnya pemisahan keuangan bisnis dan keuangan pribadi.

4.2. Alasan UMKM Menyajikan Informasi Akuntansi

Hasil analisis menunjukkan bahwa alasan UMKM di Kota Jayapura menyajikan informasi akuntansi adalah untuk kepentingan internal dan kepentingan eksternal usaha. Untuk kepentingan internal, pelaku UMKM menggunakan pencatatan untuk mengetahui jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan keuntungan yang diperoleh. Dari informasi tersebut pelaku UMKM dapat melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha yang dijalankan per bulannya. Apabila keuntungan dinilai besar pada bulan tersebut, pemilik UMKM menyimpan sebagian keuntungan untuk ditabung dan sebagian digunakan kembali untuk menjalankan usaha.

Dalam akuntansi, prinsip yang dijalankan oleh pelaku UMKM sama dengan laba ditahan dan laba yang dibagi (*dividen*). Laba ditahan dalam hal ini adalah keuntungan yang digunakan kembali dalam menjalankan usaha dan laba yang dibagi adalah keuntungan yang ditabung.

Secara substantial, praktik akuntansi pada UMKM di Kota Jayapura mengikuti prinsip akuntansi sesuai dengan SAK. Namun, dari segi pelaporan masih terdapat banyak kekurangan karena adanya keterbatasan pengetahuan akuntansi dari pelaku UMKM sendiri.

Jika dikaji berdasarkan *Theory of Reasoned Action* (TRA), keinginan pelaku UMKM untuk membuat pencatatan akuntansi untuk kepentingan internal usaha termasuk perilaku *volitional*. Penyajian informasi akuntansi berdasarkan pencatatan yang dibuat adalah atas kemauan sendiri dari pelaku UMKM. Asumsi TRA menyatakan bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia. Secara implisit dan eksplisit teori ini mempertimbangkan implikasi-implikasi dari tindakan-tindakan yang dilakukan. Implikasi dengan adanya penyajian informasi akuntansi untuk kepentingan internal adalah sebagai kebutuhan informasi dalam mengevaluasi usaha yang dijalankan.

Untuk kepentingan eksternal, pelaku UMKM di Kota Jayapura menyajikan informasi akuntansi dengan alasan sebagai pelaporan untuk perpajakan. Dari sampel yang digunakan dalam penelitian, alasan ini digunakan oleh usaha berskala menengah. Menurut pelaku UMKM tersebut, penyajian informasi keuangan digunakan untuk mengetahui jumlah pajak yang dibayar dan pelaporannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Penyajian informasi akuntansi berupa laporan keuangan dibuat oleh jasa akuntan. Hal ini sesuai dengan penelitian Son, N. Marriot dan P. Marriot tahun 2016 dan AL Smirat tahun 2013 bahwa UMKM menyajikan informasi keuangan untuk kepentingan pembayaran pajak pribadi.

Selain pemerintah, penyajian informasi akuntansi juga dilakukan untuk memperoleh modal dari pihak lain seperti bank, koperasi, maupun dari instansi pemerintah terkait. Dari hasil wawancara dengan perwakilan Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura, koperasi yang terdaftar di Kota Jayapura dan Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura bekerjasama pada program pembinaan terhadap UMKM agar UMKM di Kota Jayapura dapat berkembang. UMKM yang dibina akan mendapatkan modal kerja dengan syarat pelaku UMKM membuat pembukuan terkait aktivitas usaha. Sehingga dari pembukuan tersebut Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura dapat

mengevaluasi kinerja UMKM. Pembukuan tersebut juga digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban UMKM kepada Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura atas modal yang telah diberikan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Amoako tahun 2013 dan AUFAR pada tahun 2013 yang menemukan bahwa pencatatan akuntansi dilakukan untuk mendukung UMKM dalam memperoleh bantuan kredit dan pelaporan ke bank atau pemberi pinjaman modal.

Jika dikaji berdasarkan TRA, keinginan pelaku UMKM untuk membuat pencatatan akuntansi untuk kepentingan eksternal termasuk perilaku *mandatory*. Penyajian informasi akuntansi berdasarkan pencatatan yang dibuat wajib dilakukan untuk memenuhi persyaratan dari pihak eksternal.

4.3. Alasan UMKM Tidak Menyajikan Informasi Akuntansi

Alasan beberapa UMKM tidak menyajikan informasi keuangan disebabkan keterbatasan dari pihak internal. Walaupun penyajian informasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan pengelolaan usaha, namun adanya keterbatasan ruang lingkup aktivitas bisnis menjadi alasan UMKM enggan membuat pencatatan akuntansi [3].

Hasil penelitian ini menemukan bahwa alasan pelaku UMKM di Kota Jayapura tidak menyajikan informasi akuntansi karena usaha yang dijalankan adalah usaha keluarga, pengetahuan akuntansi tidak memadai, dan belum menyadari pentingnya penyajian informasi akuntansi karena merasa tidak perlu membuat dan tidak ada desakan dari pihak eksternal. Pelaku UMKM yang tidak membuat pencatatan menghitung uang (kas) yang ada di laci atau tempat penyimpanan uang untuk mengetahui jumlah pemasukan. Selanjutnya, untuk mengetahui pengeluarannya, pelaku UMKM menghitung jumlah pembayaran terkait belanja kebutuhan usaha. Sisa pemasukan yang tidak digunakan untuk berbelanja mereka sebut sebagai keuntungan.

Hasil penelitian di atas sejalan dengan hasil penelitian Amoako yang menyatakan bahwa UMKM tidak menyiapkan laporan keuangan yang layak karena pemilik tidak menyadari pentingnya pencatatan akuntansi, kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi, dan tidak mau menanggung biaya untuk menyewa profesi akuntan. Selain itu juga, UMKM tidak melakukan pembukuan karena usaha yang

dijalankan merupakan usaha keluarga, pelaku tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan akuntansi, UMKM tidak memiliki tenaga ahli dalam bidang akuntansi, dana usaha tidak dipisahkan dengan dana pemilik, akuntansi terlalu rumit, dan kegiatan UMKM masih terbatas sehingga pendapatan yang diterima tidak tetap [11].

Jika dikaji berdasarkan TRA, pelaku UMKM enggan membuat pencatatan akuntansi termasuk perilaku *volitional*. Perilaku *volitional* adalah perilaku-perilaku yang individual menginginkannya, atau menolak untuk tidak melakukannya. Dalam penelitian ini, pelaku UMKM menolak atau tidak mau membuat pencatatan akuntansi atas kehendaknya sendiri.

4.4. Manfaat Penyajian Informasi Akuntansi Bagi UMKM

Penyajian informasi akuntansi bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak internal dan eksternal UMKM. Pihak internal menggunakan informasi untuk mengambil keputusan yang bertujuan untuk mengembangkan bisnis. Sedangkan pihak eksternal menggunakan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan dalam menilai kinerja perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM, informasi akuntansi sangat membantu para pelaku untuk melakukan kontrol atas pengelolaan keuangan usahanya. Dari informasi tersebut, mereka dapat mengetahui jumlah pemasukan dan pengeluaran sehingga dapat mengevaluasi kinerja pada periode pencatatan (harian atau mingguan). Dengan demikian, para pelaku UMKM dapat mengambil keputusan untuk mengembangkan usahanya.

Fasilitator UMKM Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura dalam wawancara juga menyatakan bahwa UMKM yang menjadi binaan mengalami perkembangan setelah UMKM binaan tersebut membuat pembukuan. Walaupun peningkatan skala usaha belum tercapai, namun dari pembukuan tersebut memperlihatkan adanya peningkatan omzet dan peningkatan aset. Para pelaku UMKM binaan tersebut menggunakan pembukuan sebagai dasar evaluasi hasil usaha dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan usaha.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ediraras yang menyatakan manfaat informasi akuntansi bagi UMKM adalah sebagai berikut:

- a). Sebagai dasar penilaian kinerja, bahan

evaluasi, dan penyusunan anggaran b). Sebagai dasar pertimbangan pembelian bahan baku untuk produksi dan alat – alat produksi c). Sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan mengenai penetapan harga jual, melakukan ekspansi (membuka cabang), penambahan karyawan, pemberian insentif kepada karyawan, penambahan aset usaha, serta melakukan promosi dan d). Sebagai syarat dalam pengajuan permohonan pembiayaan kepada bank [11].

5. SIMPULAN

Peran informasi akuntansi bagi UMKM penting dalam menopang pengembangan usahanya. Sayangnya, kebanyakan UMKM tidak menyajikan informasi akuntansi secara formal dan layak bahkan ada yang tidak menyajikan informasi akuntansi. Di Kota Jayapura, sebanyak 57% dari total sampel pelaku UMKM di Kota Jayapura tidak membuat pencatatan dan 43% dari total sampel pelaku UMKM tersebut telah membuat pencatatan akuntansi. Pencatatan yang dibuat oleh pelaku UMKM untuk tujuan internal adalah pencatatan pemasukan dan pengeluaran berbasis kas. Bentuknya seperti buku besar kas tiga kolom. Adapaun usaha berskala menengah telah membuat laporan keuangan yang formal dan lengkap tetapi ditujukan untuk kepentingan eksternal.

Pelaku UMKM di Kota Jayapura pada umumnya membuat pencatatan akuntansi untuk kepentingan internal usaha. Pencatatan digunakan untuk mengevaluasi kinerja harian atau mingguan dari usaha yang dijalankan. Berdasarkan TRA, hal ini menunjukkan perilaku *volitional* karena membuat pencatatan atas keinginan sendiri. Untuk usaha berskala menengah menyajikan laporan keuangan hanya untuk kepentingan pajak. Pelaku UMKM menunjukkan perilaku *mandatory*. Hal ini karena pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban.

Pencatatan yang sederhana dilakukan karena pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai akuntansi. Selain itu, pelaku UMKM yang tidak membuat pencatatan akuntansi beralasan bahwa usaha yang dijalankan adalah usaha keluarga dan aktivitas usaha masih terbatas. Walaupun demikian, pelaku UMKM di Kota Jayapura telah menerapkan prinsip entitas ekonomi dalam

menjalankan usahanya. Keuangan pribadi dan keuangan usaha telah dipisahkan.

Penyajian informasi akuntansi yang masih sederhana sebenarnya telah menumbuhkan benih – benih kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya pencatatan akuntansi. Namun, UMKM masih belum menyajikan informasi akuntansi secara kompleks dan formal karena kurangnya desakan dari pihak eksternal. Untuk membuat pencatatan secara internal juga masih belum dilakukan oleh beberapa pelaku UMKM karena merasa tidak butuh. Padahal informasi akuntansi memberikan manfaat bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Manfaat utama yang diperoleh dari penyajian informasi akuntansi adalah sebagai dasar dalam evaluasi kinerja usaha yang dijalankan dan pengambilan keputusan ekonomi terkait penetapan harga jual, pertimbangan melakukan promosi, serta jenis produk yang perlu dikembangkan.

5.1. Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini berimplikasi bagi pelaku UMKM untuk membuka wawasan akan pentingnya penyajian informasi akuntansi dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan ke pemerintah, lembaga keuangan pemberi modal, dan dewan standar untuk lebih memberikan alternatif pencatatan yang sesuai dengan skala usaha masing-masing dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah masih terbatasnya pelaku UMKM yang bersedia menjadi responden. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak responden. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan campuran dalam menganalisis data, yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. K. Amoako, "Accounting Practices of SMEs: A Case Study of Kumasi Metropolis in Ghana," *Int. J. Bus. Manag.*, vol. 8, no. 24, pp. 73–83, 2013.
- [2] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah." pp. 1–13, 2008.
- [3] D. D. Son, N. Marriott, and P. Marriott, "Users' perceptions and uses of

- financial reports of small and medium companies (SMCs) in transitional economies: Qualitative evidence from Vietnam,” *Qual. Res. Account. Manag.*, vol. 3, no. 3, pp. 218–235, 2006.
- [4] B. Y. AL Smirat, “The Use of Accounting Information by Small and Medium Enterprises in South District of Jordan ,(An empirical study),” *Res. J. Financ. Account.*, vol. 4, no. 6, pp. 169–175, 2013.
- [5] Lembaga Pemeringkat Kredit bagi UMKM Indonesia, *Kajian Akademik Pmeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*, no. i. 2010.
- [6] A. Ystr, “Financial reporting in entrepreneurial SMEs,” 2010.
- [7] M. Drever, P. Stanton, and S. McGowan, *Contemporaray Issues In Accounting*. Australia: John Wiley & Sons Australia, Ltd, 2007.
- [8] L. Zhihua, “The Construction of SME Accounting Information System,” pp. 9–13, 2011.
- [9] Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa AKuntabilitas Publik*. 2013.
- [10] Ikatan Akuntan Indonesia, *SAK EMKM*. Ikatan Akuntan Indonesia, 2018.
- [11] D. T. Ediraras, “Akuntansi dan kinerja ukm,” vol. 15, no. 100, pp. 152–158, 2010.
- [12] A. AUFAR, “Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM (Survei pada Perusahaan Rekanan PT. PLN (Persero) di Kota Bandung),” Universitas Widyatama, 2013.
- [13] K. W. Indralsmana, “Penerapan sistem informasi akuntansi dan kinerja individu pada usaha kecil dan menengah di nusa penida,” vol. 2, pp. 345–356, 2014.
- [14] I. Ajzen and M. Fisbein, *Information Seeking Behavior and Technology Adoption: Theories and Trends, Chapter: Theory of Reasoned Action (TRA)*. IGI Global, 1980.
- [15] M. M. B. and A. M. Huberman, *Qualitative data analysis*, 2nd ed. USA: Sage Publication, 1994.
- [16] S. Holmes and D. Nicholls, “An Analysis of The Use of Accounting Information by Australian Small Business,” *J. Small Bus. Manag.*, 1988.
- [17] J. S. T. Zotorvie, “A study of Financial Accounting Practices of Small and Medium Scale Enterprises (SMEs) in Ho Municipality,” *Int. J. Acad. Res. Bus. Soc. Sci.*, vol. ISSN 2222-, no. 7, pp. 29–39, 2017.

BIOGRAFI PENULIS

Dian Pertiwi, lahir di Ujung Pandang 25 Juni 1990. Meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin pada tahun 2013. Kemudian meraih gelar Akuntan (Ak.) pada Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014 dan gelar Master (M. Acc.) pada Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016. Pada tahun 2017 menjadi Dosen Luar Biasa di Universitas Fajar Makassar. Saat ini aktif sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua.